

BAB III
PENETAPAN GAGASAN MR. ASSAAT MENJADI PERATURAN
PRESIDEN RI NO. 10 TAHUN 1959

3.1 Gagasan Mr. Assaat Tahun 1956

Gagasan Mr. Assaat muncul pada tanggal 19 Maret 1956, yaitu pada acara Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya. Pembicara utama adalah Mr. Assaat, beliau merupakan seorang pengusaha yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1950, dan Menteri Dalam Negeri pada kabinet Natsir. Beliau bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh Indonesia yang berpengaruh. Mr. Assaat menyampaikan pidato pada kongres tersebut, beliau mengungkapkan mengenai kenyataan perekonomian yang dialami oleh pribumi, namun sebenarnya beliau masih ragu untuk menyampaikannya. Mr. Assaat menyerukan kebijakan ekonomi guna melindungi perekonomian pribumi dari etnis Tionghoa. Mr. Assaat dalam pidatonya menuduh etnis Tionghoa bertanggung jawab atas banyak kesulitan ekonomi Indonesia. Beliau juga menyebutkan mereka sebagai kelompok oportunist, mereka telah membantu Belanda pada masa pemerintahan Belanda, khususnya dalam bidang perekonomian.⁸⁰

Mr. Assaat berorasi tentang sikap etnis Tionghoa yang monopolistis dalam bidang perekonomian, sehingga mereka enggan untuk berbagi ruang dengan pribumi. "Orang-orang Tionghoa sebagai suatu golongan yang eksklusif menolak masuknya orang lain, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka begitu eksklusif sehingga dalam praktiknya bersikap monopolistis", begitulah cuplikan dari orasi Mr. Assaat. Di penghujung orasinya, Mr. Assaat mengungkapkan bahwa dengan kenyataan itulah diperlukan suatu perlindungan ekonomi untuk warga negara

⁸⁰ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), hlm. 481-482.

⁸⁰ Ratna Puspitasari, Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Gender Antar Etnis di Indonesia) (*Jurnal Edueksos*, III(2), 2014), hlm. 5.

Indonesia dari penduduk asing.⁸¹ Pidato Mr. Assaat langsung terasa pengaruhnya, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya komite-komite untuk mendukung gagasan Mr. Assaat di berbagai tempat sudah terbentuk dalam waktu beberapa minggu. Gagasan Mr. Assaat ternyata mendapatkan dukungan yang serius dengan adanya komite-komite tersebut, dengan kata lain pemerintah harus mengambil tindakan tegas dalam menghadapi situasi tersebut.⁸²

Gagasan Mr. Assaat kemudian menjadi Gerakan Assaat. Gerakan Assaat mendapat tanggapan yang positif dari sebagian besar kelompok masyarakat Indonesia yang mengetahuinya, yaitu berupa simpatik terhadap gerakan tersebut. Partisipasi aktif sebagian besar merupakan pengusaha. Cabang-cabang utama dari Gerakan Assaat didirikan di daerah-daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim diantaranya, di Sulawesi Selatan, Lombok, dan berbagai bagian di Kalimantan dan Sumatera, selain itu, ada sejumlah cabang di Jawa, dengan keanggotaan sebagian besar berasal dari Sunda, Madura, dan santri Jawa. Dukungan lain datang dari komunitas priyayi Jawa, namun dukungannya hanya sedikit.⁸³

Gagasan Mr. Assaat yang kemudian menjadi Gerakan Assaat merupakan sebuah gerakan sosial. Gerakan Assaat dilakukan secara terorganisir sebagai upaya untuk mendorong perubahan sosial dikarenakan kondisi pada saat itu dianggap tidak stabil. Perekonomian yang dialami oleh pribumi tersebut merupakan perekonomian yang tidak stabil, dalam kasus ini dianggap bahwa etnis Tionghoa yang sulit berbagi ruang dengan pribumi. Dengan kata lain, Gerakan Assaat merupakan sebagai respon dari keadaan perekonomian pribumi saat itu.⁸⁴ Gerakan sosial yang dilakukan Mr. Assaat memenuhi kriteria suatu gerakan yang berpotensi mencapai keberhasilan. Kriteria tersebut yaitu, Mr. Assaat memiliki kepemimpinan yang cukup baik yaitu dengan pengalaman dari rekam jejak pengalaman dalam menjalankan jabatannya, kemudian Mr. Assaat merupakan tokoh yang memiliki citra positif, taktik yang digunakan Mr. Assaat yaitu dengan

⁸² Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 482.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial* (Malang: Intrans Publishing, 2016), hlm. 14-16.

berorasi pada tempat dan waktu yang tepat sehingga gagasan dapat menjadi masif, selain itu juga Mr. Assaat memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai upaya melindungi perekonomian pribumi, dan gagasan Mr. Assaat memiliki pendukung baik dari kalangan pemerintah maupun rakyat.⁸⁵

Gagasan Mr. Assaat kemudian menimbulkan anti etnis Tionghoa, hal ini berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah acara Kongres Importir di Surabaya. Pada 23 Juni seorang pengusaha muda kaya keturunan Tionghoa dan berkewarganegaraan Indonesia, yaitu Ir. Han Swie Tik, terlibat adu mulut dengan seorang perwira angkatan darat, Kapten Dr. Harjono. Harjono menggunakan bahasa menghina kepada Han, sehingga terjadilah perkelahian antar kedua orang tersebut. Akibat dari perkelahian tersebut, Harjono terluka, namun tidak terluka parah, tetapi masalahnya dia telah dipermalukan oleh Han di depan umum, dan dia mengancam akan mengambil tindakan hukum. Ancaman tersebut ternyata bukan gertakan semata, karena setelahnya Han dihubungi oleh Mayjen Bambang Sugeng, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, yang ternyata memberinya surat dari Pengadilan Tinggi Jakarta.⁸⁶

Peristiwa tersebut tidak berhenti pada ancaman berbentuk lisan saja, kemudian pada salah satu malam di bulan Juli terdapat beberapa puluhan anggota tentara, bersama dengan warga sipil yang pernah menjadi anggota kesatuan tentara pelajar selama Revolusi, melakukan penyerangan terhadap sebuah perusahaan motor milik Han yang terletak di salah satu jalan raya utama Jakarta. Mereka membuat berbagai kerusakan yaitu dengan memecahkan jendela, melukis slogan-slogan yang mengancam, dan menembakkan beberapa peluru, namun, aparat setempat tidak mengambil tindakan atas kejadian tersebut, akibatnya peristiwa demikian terjadi lagi. Walaupun penyerangan tersebut terulang kembali, aparat setempat masih belum bertindak, bahkan banyak pers yang menyatakan persetujuan. Pers tersebut tidak hanya menyatakan persetujuan terhadap peristiwa

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

⁸⁶ Herbert Feith, *loc. cit.*, hlm. 482-483.

yang menjurus pada anti etnis Tionghoa, namun pers juga mengkritik para pejabat yang menerima suap dari etnis Tionghoa.⁸⁷

Surat kabar mengenai anti etnis Tionghoa bermunculan, sebagian besar surat kabar, yaitu yang selain surat kabar milik orang Tionghoa atau milik PKI, mengeluarkan peringatan kepada Han dan orang Tionghoa pada umumnya mengenai para pejabat Indonesia yang menerima suap dari mereka. Selain surat kabar, muncul selebaran berbahasa Mandarin di tiang-tiang lampu di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Solo. Peristiwa Han ternyata belum selesai, dia bersembunyi dan menjadi objek pencarian polisi. Setelah peristiwa Han, muncul peristiwa Lie. Hal ini berdasarkan dari laporan surat kabar yang menunjukkan bahwa pegawai Percetakan Negara membenci pengaruh Lie Hok Thay, seorang pengusaha Tionghoa berkewarganegaraan Indonesia yang belum lama diangkat menjadi wakil direktur percetakan. Penunjukan Lie sebagai wakil direktur dinilai terdapat kegagalan, dia dituduh mampu mendominasi Direktur percetakan *Piet de Queljoe*. Lie itu seperti Han, orang yang masih muda, kaya, dan cakap.⁸⁸

Kabar mengenai Lie kemudian merembet pada masa lalu Lie. Desas-desus menyatakan bahwa Lie merupakan seorang pemeran berkekuatan tinggi yang berpengaruh di banyak lapisan elit politik. Lie dikatakan sebagai perwira Belanda di Indonesia. Perwira yang dimaksud ialah yang terjadi pada jaman kolonial, bahwa Belanda akan mengangkat orang terkemuka etnis Tionghoa untuk mengepalai kelompoknya, biasanya orang yang diangkat tersebut disebut sebagai Perwira Tionghoa yang bergelar Letnan, Kapten, bahkan Mayor. Tugas Perwira Cina ialah menjelaskan undang-undang pemerintah dan mengumpulkan pajak kelompoknya. Perwira Tionghoa mendapat imbalan berupa hak monopoli perekonomian berupa hak pembuatan garam, pertambangan timah, dan percetakan uang perak. Selain menjadi kaya, Perwira Tionghoa juga kuat secara politis.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 483.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Yeni Wijayanti, Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina (*Jurnal Artefak*, 3(2), 2018), hlm. 114.

Peristiwa Lie terjadi pada 17 Juli. Secara tiba-tiba, Lie diculik oleh sekelompok pemuda, pada waktu yang bersamaan mereka menyebarkan selebaran anti-Han Swie Tik, sementara Han masih belum ditemukan. Pemerintah masih belum mengambil tindakan atas dua peristiwa tersebut, walaupun telah berjalan berminggu-minggu. Lie Kemudian ditemukan, dan Han juga ditemukan setelah beberapa hari Lie ditemukan, mereka pun dipenjara. Han divonis satu setengah tahun penjara pada 12 November 1956, dan Lie tujuh tahun pada 30 Juli 1958. Kasus Han dan Lie merupakan luapan emosi yang dipicu oleh gagasan Mr. Assaat yang sebelumnya telah ada, dan seolah-olah mendapatkan momen yang tepat untuk meluapkannya. Gagasan Mr. Assaat pada awalnya memunculkan Gerakan Assaat yang merupakan tindakan yang terorganisir, sebelum pada akhirnya ditetapkan dalam peraturan presiden, namun, ternyata muncul fenomena perilaku kolektif yang tentu saja tidak terorganisir, yang pada awalnya terorganisir pada pengusaha yang memajukan klaim ekonomi, kemudian muncul kelompok-kelompok yang tidak terorganisir.⁹⁰

3.2 Penetapan Kebijakan Ekonomi Assaat 1956-1959

Gagasan Mr. Assaat pada awalnya menuai kritik dari sebagian besar pimpinan politik, nyaris tidak ada pemimpin politik atau redaktur yang menjamin hukum dan konstitusional dalam kasus Han dan Lie. Pada bulan Juli, sejumlah pemimpin politik mengajukan tuntutan untuk memperluas gagasan Mr. Assaat di luar bidang ekonomi, mereka meminta agar diperluas pada bidang pendidikan. Pemimpin Masyumi dan ketua seksi Pendidikan parlemen, Dr. Ali Akbar, menyerukan kuota pendidikan untuk orang Tionghoa, sementara itu, Djadja Wiriasumita, seorang anggota parlemen NU (Nahdhatul Ulama) melaporkan penyelidikannya tentang penyelundupan yang diorganisir oleh tentara di Sumatera Timur, menyatakan bahwa sementara tindakan pimpinan tentara di sana dapat dipertahankan secara moral, penyelundupan tersebut ternyata terdapat campur tangan orang-orang Tionghoa, dan menyatakan mereka harus dideportasi. Pemerintah cenderung pasif terhadap peristiwa yang berkembang tersebut.

⁹⁰ Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 484.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 484-485.

Peristiwa Han dan Lie seolah dibenarkan oleh sebagian besar pihak, karena tidak adanya tuntutan hukum kepada mereka dalam kasus Han dan Lie. Han dan Lie sendiri pada akhirnya diadili dan dihukum.⁹¹

Respon kabinet dan para pemimpin partai terhadap gagasan Mr. Assaat terdapat perbedaan, mereka terdapat yang pro dan terdapat yang kontra. Pihak kontra berpendapat bahwa hal ini dikhawatirkan akan terjadinya kedidakstabilan politik. Beberapa pemimpin kabinet sebenarnya memiliki perasaan anti etnis Tionghoa secara pribadi, meski demikian, banyak di antara mereka justru khawatir akan adanya peristiwa-peristiwa Han dan Lie terulang kembali di kemudian hari. Para pimpinan kabinet PNI (Partai Nasional Indonesia) memiliki kecurigaan yang kuat terhadap rivalnya, yaitu partai-partai Islam. Karena Mayjen Bambang Sugeng merupakan orang yang memberi kabar terhadap Han dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Jaksa Penuntut Umum Soenario, dan Kepala Percetakan Negara *Piet de Queljoe* semuanya adalah anggota atau simpatisan PNI, yang mereka tidak bersikap sekeras rivalnya terhadap etnis Tionghoa.⁹²

Orang-orang di PNI pada umumnya mereka tidak memiliki perasaan anti etnis Tionghoa dibandingkan dengan orang-orang dari partai-partai Islam, namun, dukungan yang cukup besar dalam kabinet terhadap tuntutan Gerakan Assaat tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada bulan Oktober, Menteri Perekonomian Burhanuddin dari NU mengeluarkan pernyataan umum tentang posisi pemerintah terkait pertanyaan yang diajukan Mr. Assaat, terdapat jeda berbulan-bulan untuk menentukan sikap pemerintah dari gagasan Mr. Assaat, yaitu dari bulan dicetuskannya gagasan pada bulan Maret, dan pemerintah menentukan sikap secara resmi pada bulan Oktober, walaupun penetapan gagasan sudah lebih dulu yaitu pada bulan Juli. Gagasan Mr. Assaat disambut cukup baik oleh pemerintah, yaitu dengan pernyataan bahwa tingkat dukungan tertinggi dari pemerintah akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang seratus persen dikendalikan oleh pribumi.⁹³

⁹² *Ibid.*, hlm. 485.

⁹³ *Ibid.*

Perbedaan antar partai-partai tersebut sangatlah wajar, bahkan mereka seringkali bersaing, yang mana persaingan tersebut seringkali tidak memberikan kepemimpinan yang diperlukan oleh negeri ini. Serangkaian kabinet koalisi yang lemah, tidak dapat dihindari dari sistem multi partai tidak dapat menjamin pemerintahan yang kuat dan stabil. Apalagi pandangan mereka terhadap peristiwa yang sedang berlangsung memiliki pandangan yang beragam.⁹⁴

Sentimen anti etnis Tionghoa ternyata seolah menemukan wadah untuk meluapkannya. Hal-hal yang pada awalnya dikhawatirkan, pada akhirnya terjadi. Latar belakang bahwa etnis Tionghoa telah sejak dulu menguasai perekonomian Indonesia dan bermitra dengan Belanda, sementara pribumi selalu berada di bawah, namun ledakan politik terjadi tahun 50-an karena pada masa-masa sebelumnya masih berfokus pada hal lain dan baru menemukan momen yang tepat untuk meluapkannya. Gelombang anti etnis Tionghoa terjadi pada 1950-an terjadi karena fakta yang sangat jelas bahwa kekuatan bisnis etnis Tionghoa yang sangat besar. Meskipun bisnis etnis Tionghoa telah mengalami berbagai pembatasan dari kebijakan pemerintah yang dicanangkan, pada umumnya eksistensi mereka dalam bidang perekonomian tidak menurun. Fakta lain bahwa ketika bisnis Belanda mengalami kemunduran, etnis Tionghoa mampu mengisi kekosongan tersebut, sementara itu, pengusaha pribumi tidak dapat mengisi kekosongan tersebut dengan keterampilan yang seimbang. Perasaan anti etnis Tionghoa telah ada selama puluhan tahun dan ratusan tahun di daerah-daerah tertentu, sayangnya perasaan tersebut semakin membesar terutama pada kelompok tertentu.⁹⁵

Perasaan anti etnis Tionghoa semakin melebar, meski demikian, beberapa partai besar tidak ingin menggunakan seruan anti etnis Tionghoa karena mereka ternyata menerima uang dari etnis Tionghoa. Karena biasanya pengusaha-pengusaha etnis Tionghoa berskala besar (Cukong atau Konglomerat), mereka berkontribusi besar dalam kegiatan pemilu, dengan tujuan ketika kandidat yang mereka sokong dapat mempertahankan eksistensi mereka, maka kedua belah

⁹⁴ Donald Wilhelm, *Indonesia Bangkit* (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 32-33.

⁹⁵ Herbet Feith, *op. cit*, hlm. 485-486.

pihak dapat dikatakan saling menguntungkan.⁹⁶ Partai-partai seperti Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), mereka sebenarnya tidak bebas begitu saja dalam mengekspresikan anti etnis Tionghoa, karena terdapatnya kekangan dari pemimpin puncak yang lebih berpengaruh dan pertimbangan terhadap tatanan hukum yang sedang mereka bangun. Pengekangan tersebut akan berpengaruh pada pimpinan partai secara hirarki dan pada akhirnya tidak ada yang melanggar. Pengekangan tersebut berlaku pada masa-masa pemilu, jika pemilu usai, maka cara-cara tersebut tidak efektif lagi. Partai-partai seperti Masyumi dan PSI, mereka juga mendapat dukungan dari kota-kota dan komunitas-komunitas yang terdapat perasaan anti etnis Tionghoa sangat kuat.⁹⁷

Pemerintah dalam upayanya melindungi perekonomian pribumi dari pebisnis asing tidaklah mudah, dengan mengeluarkan berbagai kebijakan belum menjamin keberhasilan tujuan yang telah ditentukan. Salah satu masalah yang muncul ialah banyak perusahaan Belanda menjual perusahaan mereka di Indonesia, sedangkan yang mampu membelinya dalam mata uang asing kebanyakan ialah etnis Tionghoa. Hal ini telah menimbulkan rasa ketidakpuasan politik secara umum begitu tinggi pada periode pasca pemilu. Pribumi menemui nasib yang tidak menguntungkan, kebanyakan dari mereka tidak mampu membeli dan merasa kesulitan mencari celah bisnisnya.⁹⁸

Pemerintah terus berupaya untuk melindungi perekonomian pribumi dan supaya mencapai kestabilan perekonomian. Tahun 1959, setelah melalui proses pro dan kontra di kalangan partai, keluar Peraturan Presiden No.10 Tahun 1959 yang menyatakan larangan melakukan perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di daerah pedesaan. Dilaksanakannya Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 mengakibatkan setidaknya puluhan ribu etnis Tionghoa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedesaan. Peraturan tersebut yang

⁹⁶ Irwanti Said, Hubungan Etnis Cina dengan Pribumi (Sebuah Tinjauan Sosiologis) (*Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Edisi 2 Mei 2019), hlm. 7-8.

⁹⁷ Herbert Feith, *op. cit.*, hlm. 486-487.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 487.

sebenarnya melarang untuk berdagang eceran, namun dalam pelaksanaannya juga melarang untuk bertempat tinggal.⁹⁹

⁹⁹ Nur Hidayah dan Retno Winarni, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012 (*Publika Budaya*, 2(2), 2014), hlm. 23-24.